KAJIAN PERAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA SEKOLAH MA AS'ADIYAH NO. 1 ATAPANGE

Oleh: Malik Ibrahim¹, A. Octamaya Tenri Awaru²

^{1,2}Program Studi pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

Email: malikibrahim5752@gmail.com¹, a.octamaya@unm.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange. 2) Bentuk peran masyarakat terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria kepala sekolah, orangtua siswa dan masyarakat sekitar sekolah yang tergabung dalam pengurus komite sekolah, pengurus yayasan, masyarakat dari kalangan pengusaha, serta masyarakat dari kalangan pendidikan. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gambaran pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange, yaitu pembelajaran, kepemimpinan sekolah dan partisipasi komite sekolah. 2) Bentuk peran masyarakat terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange, yaitu peran dalam mengambil keputusan atau kebijakan, partisipasi dalam melaksanakan program manajemen berbasis sekolah, peran untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan peran dalam mengevaluasi program manajemen berbasis sekolah.

Kata Kunci: Peran, Masyarakat, Manajemen Berbasis Sekolah.

PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di dunia pendidikan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur mutu pendidikan pada suatu bangsa khususnya di Indonesia. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang telah diprogramkan oleh pemerintah sebagai kebijakan sekaligus pemberian wewenang sepenuhnya kepada sekolah untuk mengelola dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Mustiningsih dalam (Suryono & Raharja, 2003) menyatakan bahwa "Esensi MBS adalah pemberian otonomi sekolah

dalam rangka peningkatan mutu sekolah, Otonomi sekolah juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan yang lebih mandiri pada sekolah yang mengandung makna swakarsa, swakarya, swadana, swakelola, dan swasembada”.

Jadi, tujuan pemerintah memberikan otonomi di bidang pendidikan yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan formal dapat mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu dengan adanya otonomi daerah pada bidang pendidikan pemerintah berupaya dan bertekad untuk memberdayakan sekolah diseluruh jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang sekolah menengah atas. Olehnya itu segala wewenang diberikan kepada setiap sekolah. Dalam hal ini, sekolah harus mampu memberdayakan sumber dayanya dengan meningkatkan kegiatan manajemen sekolah yang efektif dan efisien.

Manajemen berbasis sekolah mempunyai tujuan memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada kepala sekolah. Adapun (Supriono & Sapari, 2001) bahwa “tujuan penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi pendidikan di sekolah”. Jadi disini dapat dipahami bahwa Penerapan MBS itu sangat penting untuk memandirikan sekolah dalam rangka menjalankan pengelolaan yang efektif dan efisien. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah dilaksanakan oleh berbagai sekolah di Indonesia mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang sekolah menengah atas. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan MBS tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Serta masih banyak sekolah-sekolah yang belum memahami faktor penghambat MBS dan bagaimana upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan MBS.

Pada dasarnya pelaksanaan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaannya tersebut mengalami kegagalan atau tidak berhasil. Sehingga pihak sekolah dapat melakukan antisipasi untuk meminimalisir masalah tersebut. Wohlstetter & Mohtman dalam (Kholis, 2003) menyatakan bahwa “salah satu faktor yang menyebabkan mengapa pelaksanaan MBS pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia tidak berhasil atau tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena sekolah khususnya kepala sekolah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi seluruh anggota Dewan sekolah dan stakeholder (masyarakat)”.

Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan MBS dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, maka dari itu sekolah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bersinergi dalam suatu wadah dewan pendidikan dan komite sekolah yang mandiri. Di dalam pendidikan peran serta masyarakat meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengimplementasikan MBS sesuai cita-cita pendidikan nasional. Selanjutnya, sekolah harus senantiasa mengajak seluruh anggota dewan, warga sekolah termasuk masyarakat untuk membuat agenda. Kesepakatan atas agenda yang akan dijalankan ini

akan menjadi pegangan utama kepala sekolah dalam menjalankan dan menerapkan MBS.

Jadi dalam penerapannya, MBS harus didukung oleh peran serta masyarakat yang tinggi. Didalam partisipasinya dalam pelaksanaan MBS masyarakat ikut merumuskan, mengembangkan kebijakan program, pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas yang akan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. MA (Madrasah Aliyah) As'Adiyah No. 1 Atapange Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo adalah MA swasta yang didirikan pada 09 November tahun 1973 di bawah pengelolaan Yayasan Nurul Yaqin Atapange. Dalam hasil pengamatan langsung di lapangan pelaksanaan MBS di MA AS'Adiyah No. 1 Atapange melibatkan masyarakat sekitar. Menurut Hardina (wawancara, 5 Oktober 2021) mengatakan uniknya disana sebagian anggota komite sekolah direkrut dari masyarakat dan berfungsi saat penyelenggaraan kegiatan workshop kurikulum sekolah. Meskipun madrasah tersebut sudah menjalankan MBS tetapi dalam kenyataannya hasilnya belum maksimal karena masih terdapat masalah kesadaran masyarakat dalam mengambil peran dalam pendidikan masih kurang, selain itu dana pembangunan yang belum cukup dan kurang lengkapnya sarana media pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan hasil penelitian kajian peran masyarakat terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange. Adapun (Moleong, 2007) bahwa "penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah".

PEMBAHASAN

1. Gambaran Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange.

Dalam pelaksanaan MBS semua komponen sekolah harus meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini sangat diperlukan karena untuk mencapai tujuan pendidikan, output yang diperoleh dari proses pendidikan harus memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan itu tidak terlepas dari peranan sekolah, seperti kepala sekolah, komite sekolah dan orangtua siswa. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan pendidikan. Oleh karena itu untuk gambaran pelaksanaan Manajemen

Berbasis Sekolah dapat dilihat dari indikator, pembelajaran, kepemimpinan sekolah yang kuat, partisipasi komite.

Pertama, pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange profesionalisme guru-guru masih kurang karena inovasi sebagian guru disana belum mumpuni dalam melaksanakan pembelajaran di kelas seperti menerapkan berbagai model pembelajaran di kelas yang pro perubahan yang bisa membuat siswa aktif belajar di kelas. Hal ini berkaitan erat dengan yang diungkapkan oleh Elawati dkk dalam halaman (Fajrin, 2018) bahwa "proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang belum efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya nyata yang tersedia di sekolah. Secara umum strategi/metode/teknik pembelajaran dan pengajaran harus pro- perubahan yaitu mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi dan eksperimentasi peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Pembelajaran kuantum, pembelajaran kooperatif, adalah contoh-contoh yang dimaksud pembelajaran pro perubahan".

Di samping itu guru MA As'adiyah masih perlu untuk menjalani pelatihan dalam mengajar karena guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian tertentu. Hal ini dijelaskan dalam (Arifin, 2017) bahwa "profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus". Guru-guru di sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange sebagian besar hanya menerapkan 1 atau 2 model pembelajaran di kelas yang membuat materi pembelajaran kurang diserap oleh siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi kurang efektif. Selanjutnya pada sekolah tersebut masih kekurangan alat atau media pembelajaran seperti LCD, buku pelajaran karena dana sekolah kurang, sehingga menjadi kendala bagi guru ketika mereka ingin menyampaikan pembelajaran secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa dalam hal pembelajaran pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange, guru-guru telah diberi kebebasan dalam memilih strategi, teknik-teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, untuk mengatasi pembelajaran yang belum efektif dari penerapan mata pelajaran dari aturan kurikulum madrasah oleh pemerintah dan oleh madrasah sendiri. Selanjutnya pada sekolah tersebut masih kekurangan alat atau media pembelajaran seperti LCD, buku pelajaran dan menjadi kendala utama bagi guru untuk menyampaikan pembelajaran secara efektif di kelas. Hasil penelitian ini diperkuat dalam (Suwandi, 2011) bahwa "kendala utama dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar adalah terbatasnya sarana dan media pembelajaran".

Kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat, Kepemimpinan sekolah dalam hal ini yakni kepemimpinan kepala sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange telah menggerakkan, mengkoordinasikan dan menyetarakan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia

yang akan digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sugihartati dalam (Suwandi, 2011) bahwa "pada sekolah yang menerapkan MBS, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program- program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap".

Akan tetapi kepemimpinan kepala sekolah tersebut masih perlu untuk ditingkatkan, karena belum melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi guru di sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange yang dapat meningkatkan profesionalisme guru. Karena keadaan guru MA As'adiyah No.1 Atapange masih sedikit yang sudah mendapat sertifikasi pendidik dan olehnya itu kepemimpinan kepala sekolah harus ditingkatkan. Karena guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, melatih, mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan dan untuk mendapat pengakuan profesional, guru harus memiliki sertifikasi pendidik. Hal ini sejalan dengan UU nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam (Tusriyanto, 2017) bahwa "Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik".

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kepala madrasah MA As'adiyah No.1 Atapange telah memiliki peran nyata dalam mengkoordinasikan seperti koordinasi dengan guru bersama pengurus, menggerakkan para staf madrasah dalam pelaksanaan MBS, dan menyerasikan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia. Selanjutnya kepala madrasah juga telah mendorong sekolah dengan stakeholder komite sekolah khususnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Akan tetapi kepala madrasah belum mengadakan pelatihan kompetensi guru.

Ketiga, partisipasi komite sekolah, Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini partisipasi komite sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange belum maksimal menjalankan tugasnya dalam memberikan pertimbangan, masukan, dan rekomendasi kebijakan kepada sekolah serta evaluasi pendidikan sekolah yang menyebabkan peningkatan mutu layanan pendidikan pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange menjadi terhambat. Hal ini sesuai yang diungkapkan Darma dalam (Amarin et al., 2016) dengan tambahan bahwa "dalam Pelaksanaan MBS, sekolah memiliki mitra yang mewakili masyarakat sekitarnya yang disebut komite sekolah. Tugas dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan

Manajemen Berbasis Sekolah adalah: (1) memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (2) mendorong orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan/program/ penyelenggaraan dan keluaran pendidikan”.

Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa komitmen komite madrasah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah masih perlu untuk ditingkatkan karena mereka masih belum maksimal dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan karena kepedulian anggota komite termasuk masyarakat masih kurang. Padahal dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) komite sekolah merupakan badan yang membantu sekolah dalam mengelola pendidikan.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh (Suwandi, 2011) bahwa “Tugas komite sekolah adalah memberi pertimbangan, mendukung program, pengontrol dan mediator, dan pada pendidikan menengah partisipasi komite sekolah masih kurang misalnya dalam kebijakan/program, maupun kerjasama dalam kegiatan MBS”. Dalam memajukan pendidikan melalui wadah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) komite sekolah khususnya anggota masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberi pertimbangan, membantu sekolah dalam mendukung program sekolah, dan mengontrol kegiatan sekolah. Akan tetapi partisipasi mereka masih kurang menyebabkan komitmen komite sekolah dalam pelaksanaan MBS belum maksimal.

Terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Peranan atau role memiliki beberapa bagian yaitu peranan nyata (anacted role), peranan yang dianjurkan (prescribed role), konflik peranan (role conflict), kesejangan peran (role distance), kegagalan peran (role failure), model peranan (role model), rangkaian atau lingkup peranan (role set), ketegangan peran (role strain). Seperti yang kita ketahui bahwa pada penelitian ini kajian fokusnya yakni masyarakat maka keterkaitan teori peran akan penulis kaitkan dalam ranah peran masyarakat. Dalam hal ini Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah, guru, dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola

kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini komite sekolah termasuk masyarakat yang tergabung didalamnya belum terlalu aktif dan bisa disebut sebagai kegagalan peran (Role Failure) karena komite sekolah gagal dalam menjalankan peranan tertentu untuk berpartisipasi dalam kebijakan/ program MBS yang terkait dalam pembelajaran di sekolah, bekerja sama dengan kepala sekolah dalam memimpin mengelola pendidikan.

Adapun keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian (Suwandi, 2011) dengan judul penelitian “Kajian Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Menengah” persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang yakni sama-sama membahas implementasi/ pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada hasil penelitian, yakni penelitian terdahulu dalam hal kegiatan pembelajaran di sekolah secara umum berjalan dengan baik, dengan rerata persentase 80,40%. tentang kebebasan memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang ada di sekolah. Sedangkan hasil penelitian sekarang dalam hal pembelajaran belum maksimal karena sumberdaya guru masih terdapat beberapa yang masih belum melakukan inovasi terhadap kegiatan pembelajaran seperti menerapkan berbagai model pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam kelas dan pembelajaran menjadi baik, selain itu fasilitas media pembelajaran yang belum lengkap sebagai penunjang berhasilnya proses pembelajaran.

2. Bentuk Peran Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada Sekolah MA As'adiyah No. 1 Atapange.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan, yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas. Sagala dalam (Arifin, 2017) bahwa peran mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan, dan lingkungan. Peran ini berkembang menjadi (1) peran dalam mengambil keputusan atau kebijakan, (2) partisipasi dalam melaksanakan, (3) peran memperoleh keuntungan, dan (4) peran dalam mengevaluasi”.

Pertama, peran dalam pengambilan keputusan. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat dalam berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Peran dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, saran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional. Secara keseluruhan pada peran masyarakat dalam pengambilan keputusan/ kebijakan pada pelaksanaan Manajemen

Berbasis Sekolah pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange tersebut masih perlu ditingkatkan dalam hal kehadiran rapat dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dalam hal kehadiran rapat masyarakat masih jarang untuk mengikutinya karena berbagai alasan tertentu seperti harus kepasar dan karena ada halangan tertentu. Padahal kehadiran masyarakat termasuk orangtua siswa dalam rapat sangat penting karena kontribusi mereka diharapkan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya sehingga dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan. Hal ini serupa dalam (Kholis, 2003) bahwa "partisipasi orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan dan kemajuan sekolah. Salah satu cara yang dilakukan untuk menggalang partisipasi orang tua siswa dan masyarakat adalah mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua siswa dan masyarakat sehingga rapat menjadi efektif".

Selain itu kurang aktifnya masyarakat untuk ikut rapat dalam pengambilan keputusan/ kebijakan di sekolah menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, dan mengakibatkan demokrasi yang kurang sehat serta transparansi sekolah menjadi berkurang. Hal ini sejalan dengan alasan implementasi MBS pada poin ke 7 yang disebutkan dalam Hardiyanto (Sodiah, 2016) bahwa "keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Selain itu dalam hal tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan masyarakat tidak terlalu kritis dalam menanggapi program maupun menolak program yang ditawarkan, dalam pengawasan masyarakat hanya menanggapi aturan jam pulang, perilaku siswa. Masyarakat tidak menanggapi beberapa program sekolah yang diterapkan dalam MBS mereka menerima saja program yang diterapkan sekolah. Hal ini disebutkan dalam (Pidarta, 2004) bahwa "bidang peran masyarakat seperti alat-alat belajar, dana, material untuk bangunan, auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah". Kontrol terhadap kegiatan sekolah dalam hal ini menanggapi kegiatan-kegiatan sekolah seperti pelaksanaan program sekolah. Kemudian untuk peran masyarakat dalam pengambilan keputusan selain rapat dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan yakni diskusi, sumbangan pemikiran, saran sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian orangtua siswa maupun masyarakat telah mendiskusikan bersama dengan pihak madrasah terkait dana pembangunan yang belum cukup, sumbangan pemikiran oleh masyarakat seperti usulan agar sekolah lebih memperhatikan pendidikan siswa dan usulan pelaporan dana madrasah yang harus selalu dilaporkan secara terbuka supaya masyarakat bisa membantu dalam menyumbang, untuk saran yang diberikan masyarakat seperti saran program pelatihan, peningkatan keamanan madrasah serta program hubungan luar dengan masyarakat rutin diadakan.

Kedua, peran dalam pelaksana manajemen berbasis sekolah. Peran masyarakat dalam hal ini merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya dalam wadah MBS, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan MBS tersebut. Di dalam pelaksanaan program MBS pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange, masyarakat sudah terlibat untuk menyukseskan pelaksanaan perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran

Sekolah (RKAS), serta pelaksanaan program kegiatan sekolah dalam wadah MBS. Sehingga perencanaan yang disepakati sebelumnya serta realisasi program dalam pelaksanaan MBS di sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dalam (Arifin, 2017) bahwa "peran dalam pelaksana merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur". Selain itu hal tersebut sesuai dalam (Pidarta, 2004) bahwa cara berperan masyarakat seperti "ikut dalam pertemuan, datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian, ikut bazar". Akan tetapi peran masyarakat sebagai pelaksana dalam program MBS masih belum maksimal, karena masyarakat tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam penyusunan kurikulum madrasah dan menyerahkan hal ini ke pihak sekolah saja. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi sekolah, karena dalam penyusunan kurikulum sekolah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam kurikulum untuk mengetahui kebutuhan mereka dan perkembangannya, dan penyusunan kurikulum dalam sekolah harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan yang disebutkan oleh (Fuad Ihsan, 1997) bahwa "pelaksanaan suatu pendidikan harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, salah satunya dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Di samping itu tidak berminatnya masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan kurikulum akan menjadi hambatan yang akan dihadapi oleh pihak MA As'adiyah No.1 Atapange dalam pelaksanaan MBS. Hal ini disebutkan Herdayanti & Syahrial dalam (Andrian, 2013) bahwa "salah satu hambatan dalam implementasi MBS salah satunya adalah tidak berminat untuk terlibat".

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa masyarakat telah menjalankan peran dalam pelaksana. Seperti terlibat dalam penyusunan RAPBM, RKTm, RKAM. Program yang diikuti oleh orangtua siswa maupun masyarakat di dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange yaitu, Program pesantren malam, tadarrus Al-qur'an di mesjid, workshop kurikulum madrasah, program pembangunan. Hal ini sesuai menurut Hooftse dalam (Arifin, 2017) bahwa bentuk peran yang dapat dilakukan masyarakat salah satunya "peran dalam pelaksanaan program".

Ketiga, peran dalam memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Peran ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan. Sementara itu, situs Program Managing Basic Education (MBE) mengungkapkan bahwa manfaat MBS bagi sekolah adalah menciptakan tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang terbuka. Pada pelaksanaan Kepala sekolah yang lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat rencana pengembangan sekolah. 1) Kerja sama, kerja sama adalah suatu kesepakatan untuk menjalankan usaha bersama antara seseorang maupun kelompok sosial untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Olehnya itu kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat bersama pihak sekolah dalam pelaksanaan Manajemen

Berbasis Sekolah pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange sudah berjalan baik dan saling menguntungkan antar satu sama lain. Hal ini dijelaskan dalam (Miarso, 2004) bahwa "peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan anatar pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Di samping itu hal ini serupa juga disebutkan dalam website wikipedia.org bahwa "kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama".

Selanjutnya kerja sama yang dimaksud merupakan kerja sama antara pihak masyarakat dengan sekolah dalam rangka menyukseskan pelaksanaan MBS pada sekolah tersebut seperti masyarakat bekerja sama dengan sekolah dalam hal pendanaan sekolah, kerja sama dalam pelaksanaan program sekolah karena sekolah mensosialisasikan program MBS kepada masyarakat baik program yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun program yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mulyasa dalam (Harini, 2014) bahwa "hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama. Apabila hubungan sekolah dengan masyarakat baik maka rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga baik dan tinggi. Dalam hal ini sekolah memberitahukan masyarakat tentang program-program sekolah, baik yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan".

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pihak orangtua siswa maupun masyarakat telah melakukan kerja sama dalam ranah MBS yang menguntungkan antara masyarakat dengan pihak madrasah. Adapun bentuk kerja sama dalam pelaksanaan MBS seperti kerja sama dalam sistem penggajian guru melalui untuk kesejahteraan guru, kerja sama majelis ta'lim hawa dengan guru perempuan aliyah atapange, bekerja sama dalam mendukung program madrasah, kerja sama dalam control siswa terkait siswa yang bolos tapi masih terdapat siswa yang bolos dan masyarakat masih jarang melaporkan hal tersebut pada pihak sekolah. Selanjutnya kerja sama dalam keamanan. 2) Dukungan sumbangan, dukungan sumbangan dalam hal ini masyarakat telah berpartisipasi memberikan donasinya terhadap pengelolaan manajemen berbasis sekolah pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange, baik berupa sumbangan fisik, dana untuk program MBS madrasah, dan perhatian terhadap pendidikan siswa yang berkenaan dengan pada sekolah tersebut. Hal tersebut serupa dalam (Pidarta, 2004) mengemukakan bahwa bidang peran masyarakat seperti alat-alat belajar, dana, material untuk bangunan, auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 bahwa "bentuk partisipasi masyarakat pada poin 4 disebutkan yaitu pengadaan dan dan pemberian bantuan sarana belajar bangunan, dan lain-lain".

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa adapun bentuk sumbangan orangtua siswa maupun masyarakat terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yakni, sumbangan dana melalui amplop yang dibagikan pihak madrasah aliyah di mesjid-mesjid, sumbangan tenaga, sumbangan pasir untuk pembangunan

gedung kelas aliyah. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian (Arifin, 2017) bahwa melalui komite sekolah masyarakat memberikan bantuan berupa semen, kayu, asbes, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung ruang kelas dan mushola sekolah. Di dalam meningkatkan pendidikan masyarakat juga memberikan dukungan berupa alat-alat keperluan yang harus dimiliki bagi madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan.

Keempat, Peran dalam evaluasi program manajemen berbasis sekolah. Evaluasi Pada program dalam pelaksanaan MBS pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange oleh masyarakat belum terlaksana, hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya peningkatan mutu layanan pendidikan, akuntabilitas sekolah rendah dan masyarakat kurang tau bahwa apakah pelaksanaan program pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau adakah penyimpangan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan program pendidikan tersebut. Evaluasi oleh masyarakat ditujukan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan dan akuntabilitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Arifin, 2017) bahwa "peran ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Peran ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Selain itu UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 1 dalam (Arifin, 2017) berbunyi "masyarakat berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dan komite sekolah". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan fakta bahwa orang tua siswa maupun masyarakat belum melakukan program evaluasi bersama dengan pihak madrasah baik secara langsung maupun melalui komite sekolah terhadap hasil pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) MA As'adiyah No.1 Atapange.

Terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Dalam (Falasifah, 2019) bahwa "Peranan atau role memiliki beberapa bagian yaitu peranan nyata (anacted role), peranan yang dianjurkan (prescribed role), konflik peranan (role conflick), kesejangan peran (role distance), kegagalan peran (role failure), model peranan (role model), rangkaian atau lingkup peranan (role set), ketegangan peran (role strain)". Pada dasarnya bentuk peran masyarakat terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange yaitu peran dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksana program MBS, peran untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan MBS, serta peran dalam mengevaluasi. Pada peran masyarakat dalam pengambilan keputusan masih perlu untuk ditingkatkan dalam hal kehadiran dan tanggapan maupun penolakan terhadap program MBS yang ditawarkan, dalam kaitannya dengan teori peran termasuk dalam ketegangan peranan (role strain).

Ketegangan peranan (role strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan yang dijalankan dikarenakan adanya keserasian yang bertentangan satu sama lain”. Dalam hal ini masyarakat jarang untuk menghadiri rapat karena halangan tertentu dan urusan-urusan lain yang menurut mereka harus diutamakan dibanding ikut rapat penetapan program sekolah. Seperti ada masyarakat yang diundang iku rapat penetapan program tetapi mengutamakan pergi kepasar untuk bekerja mencari nafkah. Selain itu pada peran masyarakat dalam berdiskusi dengan pihak madrasah, sumbangan dalam pemikiran, dan saran sudah baik dan masyarakat telah menjalankan peranan nyata (Anacted Role). Peranan nyata merupakan peranan yang benar- benar dijalankan seseorang. Dalam hal ini masyarakat telah berdiskusi dengan baik bersama pihak madrasah mengenai program MBS seperti program pembangunan dan berbagai masalah pengelolaan di madrasah, ide atau pemikiran yang diberikan masyarakat seperti harus rutin dalam menginformasikan pelaporan madrasah secara terbuka yang menunjang akuntabilitas madrasah.

Kemudian partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program manajemen berbasis sekolah pada sekolah MA As’adiyah No.1 Atapange belum maksimal, dalam kaitannya dengan teori peran termasuk dalam jenis kesejangan peranan (role distance) dalam (Falasifah, 2019) bahwa “kesejangan peranan merupakan pelaksanaan peran secara emosional”. Di samping itu (Wahyudi & Tiara, 2022) bahwa “kesejangan peran adalah kondisi ketika seseorang harus menjalani peran yang tidak menjadi prioritas hidupnya sehingga merasa tidak cocok dengan peran tersebut”. Dalam hal ini masyarakat telah menjalankan perannya sebagai pelaksana program MBS, seperi iku dalam berbagai perencanaan dan pelaksanaan [rogram MBS seperti program pembangunan. Akan tetapi masyarakat tidak tertarik untuk terlibat dalam perencanaan kurikulum karena masyarakat merasa tidak cocok dan tidak mau ambil pusing untuk urusan itu.

Selanjutnya peran masyarakat untuk memperoleh keuntungan terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada sekolah MA As’adiyah No.1 Atapange sudah bagus. Dalam kaitannya dengan teori peran termasuk dalam jenis rangkaian lingkup peranan (role set). Rangkaian lingkup peranan merupakan peran yang dijalankan karena hubungan seseorang dengan induvidu lainnya pada saat dia menjalankan peranan. Dalam hal ini masyarakat telah berpartisipasi dalam bekerja sama dengan pihak sekolah terhadap pelaksanaan MBS untuk memperoleh keuntungan bersama terhadap output MBS kedepannya, dan karena hubungan kerja sama sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan komunikasi satu sama lain serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengembangan sekolah melalui wadah MBS. Selain itu masyarakat juga memberikan dukungan sumbangan berupa dana, bahan, material untuk kepentingan pembangunan madrasah.

Terakhir, Peran masyarakat dalam mengevaluasi program manajemen berbasis sekolah pada sekolah MA As’adiyah No.1 Atapange belum terlaksana. Dalam kaitannya dengan teori peran yang digunakan hal ini termasuk dalam jenis kegagalan peran (role failure) dalam (Falasifah, 2019) bahwa “kegagalan peran adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu”. Dalam hal ini masyarakat belum melakukan

program evaluasi bersama dengan pihak madrasah baik secara langsung maupun melalui komite sekolah terhadap hasil pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) MA As'adiyah No.1 Atapang. Hal ini menunjukkan kegagalan peran oleh masyarakat dalam hal evaluasi program MBS di madrasah. Padahal evaluasi terhadap sekolah sangat penting dilakukan oleh masyarakat karena tujuannya untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ada penyimpangan. Adapun evaluasi yang mereka lakukan hanya evaluasi yang kasat mata.

Sedangkan persamaan dan perbedaan pada penelitian (Arifin, 2017) dengan judul penelitian "Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Pendidikan". Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni sama-sama membahas peran masyarakat dalam ranah pendidikan. Adapun perbedaan pada hasil penelitian penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan peran dalam mengevaluasi sudah baik. Selanjutnya dalam ranah peran, peran masyarakat tidak hanya melalui komite sekolah tetapi juga melalui wadah dewan pendidikan dan fokusnya untuk meningkatkan mutu sarana pendidikan seperti terwujudnya masyarakat sebagai mediator yaitu memberikan pengawasannya kepada dewan pendidikan yang ada di DPRD Kabupaten tentang pencairan dana yang akan diberikan madrasah, dan masyarakat sebagai pemberi pertimbangan. Sementara hasil penelitian sekarang peran masyarakat dalam pengambilan keputusan masih perlu untuk ditingkatkan dan peran masyarakat dalam mengevaluasi yang belum baik karena belum terlaksana, disamping itu penelitian sekarang terfokus pada ranah pelaksanaan Manajemen berbasis sekolah melalui komite sekolah seperti mengajukan saran, ide untuk program MBS, tergabung dalam pengurus yayasan, maupun terlibat secara langsung seperti orang tua siswa dan masyarakat sekitar terlibat rapat kerja pengurus madrasah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai "Kajian Peran Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada Sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam gambaran pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange yaitu pembelajaran, kepemimpinan sekolah dan partisipasi komite sekolah.
2. Bentuk peran masyarakat terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah MA As'adiyah No.1 Atapange yaitu peran dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, partisipasi dalam melaksanakan program manajemen berbasis sekolah, peran untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, serta peran dalam mengevaluasi program manajemen berbasis sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarin, A., Sunandar, S., & Miyono, N. (2016). Peran Komite Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SD Islam Terpadu Buah Hati Kabupaten Pematang. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 5(1).
- Andrian, E. (2013). *Implementasi Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kabupaten Sintang*. Tanjungpura University.
- Arifin, B. (2017). *Peran masyarakat dalam meningkatkan mutu sarana pendidikan (Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi)*. IAIN Ponorogo.
- Fajrin, R. (2018). Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 132–149.
- Falasifah, A. (2019). *Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Work-Family Conflict dan Etika Kerja Islam terhadap Komitmen Organisasi Karyawan Wanita di CV. Mubarakfood Cipta Delicia*. IAIN KUDUS.
- Fuad Ihsan, H. (1997). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harini, I. N. (2014). Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pencitraan Sekolah (Studi Kasus di SMP Al Hikmah Surabaya). *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4).
- Kholis, N. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Miarso, Y. (2004). *Menyemai benih teknologi pendidikan*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Pidarta, M. (2004). *Manajemen pendidikan indonesia*.
- Sodiah, S. (2016). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat dan Sekolah. *Sosial Budaya*, 13(1), 89–100.
- Supriono, S., & Sapari, A. (2001). *Manajemen berbasis sekolah*. Jawa Timur: SIC.
- Suryono, Y., & Raharja, S. (2003). *Pengkajian Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Propinsi Daerah Istimewa YOGYAKARTA*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(2).
- Suwandi, S. (2011). *Kajian Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Menengah*. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(4), 419–432.
- Tusriyanto, T. (2017). *Sertifikasi Guru Sebagai Upaya Menciptakan Mutu Pendidikan*. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(01), 145–162.
- Wahyudi, H., & Tiara, A. (2022). *Ketimpangan Pendapatan Penyebab Tidak Bahagia*. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(2), 125–138.